

TRANSISI MENUJU DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh : Al Rafni

ABSTRACT

At this time, Indonesia is in transition era head for democracy. This process has moved to “uncompleted replacement” following the fall of Neo-patrimonial regime that was ruling for more than three decades. Many of complicated problems has raised by this era, such as disintegration, mass euphoria, segregation elite, parliamentary “noise”, as well as many kinds of conflict among political parties which hit with the fist in anger. All above become sensitive points that are decisive factors for whether Indonesia will become democratic or not in the future.

Key Words: *Transisi, Demokrasi*

I. PENDAHULUAN

Sebelum tanggal 21 Mei 1998, membayangkan “kesediaan” Soeharto mau turun dari kursi kepresidenannya setelah lebih dari tiga dekade berkuasa adalah suatu tindakan yang berada di luar imajinasi kebanyakan rakyat Indonesia. Bahkan seorang Indonesianis sekelas William Liddle menyatakan ketidakpercayaan dan keterkejutannya akan percepatan proses demokratisasi di Indonesia (Fatah, 2000). Namun bila belajar dari sejarah jatuhnya penguasa atau runtuhnya rezim-rezim otoritarianisme-totalitarianisme di beberapa negara seperti di Eropa Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur sampai pada beberapa negara di Asia yakni Filipina, Pakistan, Korea Selatan, Taiwan dan sebagainya, dapat dikatakan sudah merupakan suatu trend global. Perubahan politik global dalam tempo dua dekade terakhir ini adalah akibat arus deras demokratisasi sebagaimana yang dipopulerkan oleh Samuel P. Huntington dengan gelombang demokratisasi ketiga.

Proses demokratisasi berlangsung di antara bangsa-bangsa di dunia dalam beberapa gelombang. Menurut Huntington (1995), gelombang terakhir yaitu gelombang ketiga terjadi sejak 1974 hingga kini. Secara umum, ia menggambarkan ketiga gelombang melalui jumlah negara yang mengalami demokratisasi sepanjang abad ke-20. Di sela-sela setiap gelombang, terselip arus balik atau proses penguatan kembali otoritarianisme-totalitarianisme. Berikut ini dapat dilihat jumlah negara yang mengalami demokratisasi.

Tabel 1
Negara yang Mengalami Demokratisasi

Tahun	Negara Demokratis	Negara Non-demokratis	Jumlah Negara	% Negara Demokratis	Gejala
1922	29	35	64	45,3	Gelombang 1
1942	12	49	61	19,7	Arus Balik 1
1962	36	75	111	32,4	Gelombang 2
1973	30	92	122	24,6	Arus Balik 2
1990	58	71	129	45,0	Gelombang 3

Sumber : Fatah (2000).

Dari data tabel 1 antara lain dapat dicermati bahwa lebih dari 30 negara mengalami demokratisasi dan antara tahun 1973-1990 negara-negara demokratis di dunia telah membengkak dari 24,6% menjadi 45%. Demokratisasi dalam gelombang ketiga menjadi masa pertumbuhan demokrasi yang subur, antara lain karena gelombang itu berjalan seiring dengan globalisasi. Akibatnya demokratisasi pada sebuah negeri punya efek difusi terhadap negara-negara lainnya (Uhlin, 1995). Paling tidak apa yang terjadi di suatu belahan dunia dapat dijadikan pelajaran berharga bagi yang lainnya.

Di sisi lain, dalam tataran teoritis, studi demokrasi dan demokratisasi berkembang pesat. Kajian tentang transisi menuju demokrasi telah banyak dilakukan. Mulai dari pengkajian dalam spektrum yang luas seperti Guillermo O' Donnel, Philippe Schmitter dan Laurence Whitehead dengan studi mereka *Transition form Authoritarian Rule* sampai kajian yang profetik dari Francis Fukuyama dengan *The End of History and The Last Man*. Fakta menarik yang dapat diambil dari beberapa studi tersebut adalah tak satu pun penulis yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang demokratis maupun negara yang akan atau sedang menuju demokratisasi (Fatah, 2000). Belakangan barulah Uhlin (1997) menempatkan Indonesia pada fase pratransisi berdasarkan beberapa indikasi potensi berlangsungnya transisi ke sebuah rezim yang lebih demokratis. Menurut Uhlin fase pratransisi dimulai pada awal tahun 80-an. Fase ini ditandai antara lain dengan adanya keterbukaan politik walaupun hanya terbatas dan bergantung pada toleransi penguasa. Fase pratransisi merupakan peluang bagi terjadinya transisi menuju demokratisasi di Indonesia. Tapi hal itu tidak pernah terjadi sebelum momentum 21 Mei 1998.

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan proses transisi menuju demokrasi di Indonesia. Pengelaborasiannya dimulai dengan menjelaskan kejatuhan rezim neo-patrimonial yang kokoh dan telah berjaya lebih dari tiga dekade kemudian dilanjutkan dengan pemetaan proses transisi

menuju demokrasi di Indonesia. Akhirnya ditutup dengan kajian pasca transisi berikut prospek membangun instalasi demokrasi di Indonesia.

II. RUNTUHNYA REZIM NEO-PATRIMONIAL YANG KOKOH

Mengapa Soeharto, orang terkuat di Indonesia, yang mengontrol akumulasi dan alokasi sumber daya ekonomi-politik dari istana negara hingga di pelosok desa bisa jatuh? Faktor-faktor apa yang menyebabkannya? Sebelum memaparkan beberapa variabel penjelas tentang kejatuhan Soeharto terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa model kepolitikan Orde Baru yang selalu menjadi rujukan dalam menganalisis dan mencermati karakteristik pemerintahan Orde Baru.

Setidaknya ada tujuh model kepolitikan yang dipakai oleh para ahli dalam mengilustrasikan format politik Orde Baru. *Pertama*, model *bureaucratic polity*. Model ini dikembangkan oleh Karl D. Jackson yang meminjam hasil studi Fred Riggs di Thailand. Menurut Jackson, Indonesia di era Orde Baru dapat digolongkan ke dalam *bureaucratic polity* (Jackson dan Pye, 1978). Dalam negara seperti ini biasanya sekelompok kecil elit menguasai sepenuhnya pengambilan keputusan politik negara, sementara itu masyarakat hanya lah dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan. Dengan kalimat lain dapat dikatakan kekuasaan dan partisipasi dalam pembuatan keputusan nasional hampir seluruhnya didominasi oleh perwira militer, birokrat tingkat tinggi termasuk kaum teknokrat sipil. Singkatnya model ini menekankan pendekatan birokratik dan teknokratik. Akibatnya lembaga birokrasi menjadi lembaga politik yang paling dominan sementara lembaga politik yang lainnya seperti partai politik dan kelompok kepentingan melemah. Di lain pihak massa di luar birokrasi secara ekonomi dan politik sangat lemah. Dalam struktur kekuasaan seperti ini kompetisi politik yang terjadi hanya terbatas pada lingkaran elit birokrasi pusat.

Kedua, model *beamtenstaat* (negara pegawai). Model ini diperkenalkan oleh Ruth Mc Vey, yang didasarkan pada kinerja pemerintahan Orde Baru untuk menata birokrasi rasional yang modern, efisiensi, efektif untuk menjamin stabilitas politik sebagai syarat pembangunan ekonomi (Anderson dan Audrey Kahin (eds.), 1982). Dalam konteks ini negara lebih suka mengandalkan diri pada kekerasan dan cenderung menekankan legalitas dari segi formalitas belaka. Model ini oleh Afan Gaffar disebut juga sebagai model negara pejabat (1999).

Ketiga, model *bureaucratic authoritarian*. Model ini diperkenalkan oleh Dwight Y. King dengan beberapa ciri yang menonjol yaitu ; (1) kewenangan tertinggi terletak pada oligarki atau militer sebagai suatu lembaga ; (2) mentalitas teknokratik yang merata dengan disertai tindakan-tindakan yang represif dan doktrin-doktrin inklusif ; (3) kemauan massa untuk bekerja sangat apatis dan selalu dimobilisir oleh rezim ; dan (4) rezim dengan model ini selalu menggunakan represi,

kooptasi dan suatu jaringan organisasi kooperatif untuk mengontrol oposisi (Anderson dan Audrey Kahin (eds.), 1982).

Keempat, model *modern personal rule* dari William Liddle. Menurut pemerintah Orde Baru merupakan pemerintahan yang ditandai oleh sistem yang memunculkan penguasa modern, akan tetapi wujud kekuasaannya bersifat personal (Afan Gaffar, 1991).

Kelima, model birokratik otoriter korporatis yang diperkenalkan oleh Mohtar Mas'ood. Menurut negara Orde Baru memiliki ciri-ciri yang bernuansa otoritarian birokratik dan korporatis negara. Ciri-ciri itu sebagai berikut : (1) rezim Orde Baru dipimpin oleh militer sebagai suatu lembaga bekerja sama dengan para teknokrat sipil; (2) beberapa perusahaan besar yang mempunyai hubungan khusus dengan negara dan kapitalis internasional mendominasi perekonomian Indonesia; (3) pembuatan kebijakan yang teknokratik-birokratik; (4) massa dimobilisasikan; (5) tindakan-tindakan represif untuk mengendalikan oposisi; dan (6) kepresidenan yang otonom.

Keenam, model otoritarianisme birokratik rente yang dipopulerkan oleh Arief Budiman (1991). Ia memandang pemerintahan Orde Baru mempunyai ideologi teknokratik-birokratik yang menempatkan birokrasi sebagai kekuatan utama. Sementara itu partisipasi masyarakat dibatasi dan pembangunan ekonomi dirancang dari atas. Dalam konteks ini penggunaan kekuasaan birokrasi untuk memberikan fasilitas bagi pengusaha baik swasta mau pun perusahaan negara. Dengan demikian yang tumbuh bukan pengusaha yang kuat tetapi pengusaha yang tergantung kepada negara.

Ketujuh, model neo-patrimonial. Konstruksi ini diperkenalkan oleh Herbert Feith, Emerson, Harold Crouch, Ann Ruth Willner, Lance Castles dan Anderson. Model ini menekankan kepada kepemimpinan pribadi yang perdefinisi adalah kepemimpinan tak terkontrol. Aspek lainnya, kepemimpinan pribadi bisa dikembangkan melalui instrumen birokrasi, atau dengan kata lain neo-patrimonial bisa berlangsung melalui dominasi birokrasi. Disamping itu, model ini mempunyai perangkat publik yang besar dan secara politis penting, maka kewenangannya lebih didasarkan rasionalitas substantif ketimbang rasionalitas legal formal yang menjadi ciri birokrasi di negara-negara Barat. Disamping itu adalah hal legitimasi rezim dan adanya ketaatan atau kepatuhan massa bawah merujuk kepada imbalan kepuasan material yang diterima (Anderson dan Audrey Kahin (eds.), 1982).

Dari ketujuh model kepolitikan tersebut, dalam tulisan ini model neo-patrimonial dipakai untuk menjelaskan kokohnya pemerintahan Orde Baru dan mengapa jalan menuju demokrasi demikian sulit. Ada beberapa alasan mengapa model ini yang dipakai, diantaranya : (1) melalui model neo-patrimonial ini dapat dijelaskan betapa kuatnya penguasa pribadi Soeharto mengontrol seluruh kekuatan ekonomi, sosial dan politik ; (2) melalui model ini juga dapat dijelaskan bagaimana secara riil pengelolaan

kekuasaan dan kekayaan rezim Soeharto yang didasarkan pada pertukaran antara loyalitas dengan materi ; dan (3) melalui model ini dapat juga dijelaskan mengapa selama tiga dekade rakyat mengukuhkan pemimpin pribadi seperti Soeharto.

Dalam kekokohan rezim neo-patrimonial tersebut sulit untuk memprediksi sang penguasanya bisa jatuh. Namun kenyataan berkata lain, dimana pada akhirnya sang otokrat Soeharto jatuh dari kekuasaannya. Menurut Maswadi Rauf ada tiga variabel penjelas kejatuhan rezim tersebut. *Pertama*, tuntutan rakyat bagi dilakukannya reformasi politik dan penolakan terhadap Soeharto. Tuntutan ini dipelopori oleh para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. *Kedua*, pegunduran diri 14 menteri Kabinet Pembangunan VII. *Ketiga*, sikap ABRI yang tidak dengan tegas mendukung Soeharto (LIP FISIP-UI, 2000).

Sementara itu dalam buku *The Fall of Soeharto*, Geoff Forrester dan R.J. May (1998) telah memotret beberapa variabel penjelas jatuhnya Soeharto. Dimulai dengan variabel krisis ekonomi diikuti oleh terjadinya krisis legitimasi kemudian didukung oleh konflik inter elit (variabel penentu menjelang kejatuhan Soeharto). Variabel lain yang juga turut menentukan adalah maraknya gerakan mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Mengacu kepada pendapat yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat dipetakan bahwa terdapat enam variabel yang memicu kejatuhan Soeharto yaitu : (1) krisis ekonomi; (2) krisis legitimasi; (3) konflik inter elit; (4) gerakan mahasiswa; (5) melemahnya dukungan ABRI; dan (6) dukungan dunia internasional terhadap tuntutan perubahan.

III. TRANSISI MENUJU DEMOKRASI DI INDONESIA

Transisi merupakan tahapan awal terpenting yang sangat menentukan dalam proses demokratisasi disamping tiga tahapan lainnya yaitu liberalisasi, instalasi dan konsolidasi demokrasi. Transisi bisa didefinisikan sebagai titik awal atau interval (selang waktu) antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis. Transisi itu dimulai dari keruntuhan rezim otoritarian lama yang kemudian diikuti atau berakhir dengan pengesahan (instalasi) lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru di bawah payung demokrasi (O' Donnell dan Schmitter, 1986).

Transisi menuju demokrasi di setiap negara terjadi lewat beberapa jalur (rute) yang berbeda-beda. Huntington (1995) misalnya, melacak empat jalur transisi menuju demokrasi. *Pertama*, jalur transformasi atau jalur yang diprakarsai oleh rezim. Dengan kata lain demokratisasi dimulai dari elit yang sedang berkuasa, yang sadar bahwa strategi pembangunan di bawah rezim politik otoriter menghasilkan gelombang balik berupa tuntutan berpartisipasi dalam proses politik. Tuntutan ini tidak dapat diabaikan dan rezim politik harus membuka diri. Negara yang menempuh jalur ini antara lain Taiwan, Mexico, India, Chili, Turki, Brazil, Peru, Ekuador, Guatemala, Nigeria, Pakistan serta Sudan.

Kedua, jalur transplacement. Pada jalur ini demokratisasi dipimpin oleh fraksi elit yang sedang memerintah dengan kekuatan oposisi yang berkembang. Di sini terjadi tawar-menawar antara elit yang berorientasi mempertahankan status quo dengan elit pembaharu. Jalur ini juga dikenal dengan jalur negosiasi. Negara yang melewati rute ini adalah Nepal, Nikaragua, Mongolia, Bolivia, Honduras, El Salvador, Korea Selatan dan Afrika Selatan.

Ketiga, jalur replacement (pergantian). Demokratisasi dalam konteks ini diperjuangkan melalui gerakan oposisi dari bawah yang mencapai kemenangan untuk mengganti rezim lama. Negara yang menempuh jalur ini seperti Filipina, Jerman Timur dan Argentina.

Keempat, jalur intervensi. Jalur ini memberikan kejelasan bahwa demokratisasi dicapai melalui paksaan dari luar (pendudukan negara asing) seperti yang terjadi pada negara Granada dan Panama.

Sementara itu Alfred Stepan memetakan tiga jalur utama menuju demokrasi (O'Donnell dan Schmitter, 1986) yaitu : (1) redemokratisasi yang diprakarsai oleh rezim otoriter ; (2) peperangan dan penaklukan dari luar ; dan (3) redemokratisasi dipimpin oleh kekuatan oposisi dari bawah.

Mengacu kepada dua pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transisi menuju demokrasi berlangsung lewat tiga jalur utama yaitu transisi dari atas (transformasi), transisi dari bawah (*replacement*) dan transisi lewat transaksi (negosiasi). Jalur transisi dari atas terjadi ketika pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter mempelopori dan memainkan peranan yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem baru yang demokratis. Keputusan rezim untuk memilih sistem demokratis biasanya didasari oleh pertimbangan kelompok elit bahwa kepentingan-kepentingan mereka jangka panjang akan lebih bisa terjamin bila diperjuangkan dalam lingkungan yang demokratis. Sedangkan jalur transisi dari bawah terjadi lewat protes sosial yang tersebar dari berbagai kalangan. Protes sosial menekan rezim dan memaksa rezim untuk melepaskan kekuasaannya. Sementara itu jalur transaksi (negosiasi) dianggap oleh kebanyakan pengamat sebagai jalur yang paling aman, cepat dan sukses dalam melembagakan demokrasi. Hal ini disebabkan antara pemerintah otoriter dengan kekuatan oposisi mempunyai kekuatan seimbang sehingga pada gilirannya melahirkan kesepakatan melembagakan demokrasi dengan cepat.

Merujuk pada skenario demokratisasi di beberapa negara maka dapatlah dikatakan bahwa transisi menuju demokrasi di Indonesia merupakan proses *replacement* yang tidak sempurna, meskipun jatuhnya Soeharto karena desakan dari bawah. Habibie bukanlah bagian dari oposisi yang melakukan "kegiatan" untuk kejatuhan Soeharto. Kondisinya akan lain bila suksesi dari Soeharto ke kelompok oposisi seperti Amien Rais, Gus Dur atau pun Megawati. Untuk sekadar perbandingan, suksesi dari Soeharto ke Habibie tersebut sangat berbeda

dengan jatuhnya Marcos (1986) di Filipina karena gelombang *people power*. Kekuatan rakyat waktu itu adalah simbol dari oposisi yang terorganisir di bawah Aquino yang didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen masyarakat Filipina. Oleh sebab itu kemenangan Aquino adalah kemenangan oposisi yang berada di luar rezim berkuasa. Ketika Aquino berkuasa, dia melakukan reformasi total dan menyapu habis antek-antek Marcos, sehingga hasilnya jauh lebih baik dibandingkan kinerja Habibie di Indonesia saat itu. Sebagian pengamat mengklaim bahwa transisi di Filipina saat itu adalah transisi demokrasi yang paling sukses bila dibandingkan negara-negara lain di wilayah Asia.

Terlepas dari jalur transisi yang ditempuh, pemerintahan transisi masa Habibie pada akhirnya mampu mengantarkan bangsa ini menuju tahapan lain dalam proses demokratisasi. Menurut O'Donnel dan Schmitter (1986) transisi demokratisasi dikatakan berhasil bila : (1) penguasa otoriter telah berakhir atau kehancuran rezim otoriter sebelumnya yang dilanjutkan dengan upaya-upaya menata aturan main baru dan lembaga-lembaga politik dalam kerangka rezim demokratis; (2) setelah jatuhnya penguasa otoriter, pemimpin baru dan masyarakat luas punya semangat dan keyakinan bersama akan demokrasi sebagai alternatif terbaik bagi sistem politik; dan (3) liberalisasi politik yang terus berlanjut sebagai agenda kritis untuk melembagakan demokrasi.

Bila dicermati syarat *pertama* dari O'Donnel dan Schmitter telah terpenuhi dengan adanya komitmen Presiden Habibie untuk meneruskan agenda reformasi sebagai motor penggerak menuju Indonesia baru yang lebih demokratis. Sedangkan syarat *kedua* dapat dilihat meluapnya semangat dan keyakinan pemimpin politik dan masyarakat akan demokrasi sebagai alternatif terbaik bagi sistem politik Indonesia masa depan. Hal ini ditandai dengan adanya *euphoria* massa yang kadang-kadang tak terkontrol, dengan melegalisasi segala hal atas nama orde reformasi. Sementara syarat *ketiga* adalah berlanjutnya liberalisasi politik dari awal sampai akhir pemerintahan Habibie. Liberalisasi adalah proses pengefektifan hak-hak politik yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara atau pihak ketiga.

Perwujudan liberalisasi politik itu antara lain : (1) dibukanya kran kebebasan untuk partisipasi politik baik dalam tataran masyarakat maupun dalam kehidupan kepartaian; (2) dibebaskannya beberapa orang tahanan politik berikut pemberian abolisi dan rehabilitasi seperti pada A.M. Fatwa, H.R. Dharsono, Abdul Qadir Jaelani dan yang lainnya; (3) terbukanya kran kebebasan pers; (4) pemerintahan Habibie melakukan pemberian jaminan hak-hak sipil atau pun hak-hak asasi manusia ke arah yang lebih baik, seperti ditandatanganinya sejumlah Konvensi Internasional tentang HAM; dan (5) pemerintahan Habibie berhasil merencanakan dan melaksanakan pemilu yang relatif demokratis dengan disahkannya seperangkat regulasi di bidang politik dan pembenahan di

berbagai proses/tahapan pemilu tersebut. Dengan digelarnya pemilu pada bulan Juni 1999 dan terpilihnya secara demokratis Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai presiden dan wakil presiden maka berakhirilah tahapan transisi politik di Indonesia. Berikutnya Indonesia memasuki tahapan lain dalam proses demokratisasi yaitu tahap instalasi dan konsolidasi demokrasi.

IV.PASCA TRANSISI : PROSPEK MEMBANGUN INSTALASI DEMOKRASI

Masalah paling mendasar yang dihadapi pasca transisi adalah sejauh mana kesanggupan rezim pasca otoritarian membangun (instalasi) demokrasi yang ujungnya bermuara pada konsolidasi demokrasi. Instalasi demokrasi di Indonesia dimulai setelah melewati pemilu yang demokratis dan Sidang Umum MPR 1999.

Membangun (instalasi) demokrasi pada hakekatnya adalah mulai melaksanakan serangkaian proses reformasi politik, mulai dari struktur, kultur, proses maupun dari segi produk. Reformasi struktur politik adalah mereformasi struktur politik yang ada di dalam sistem politik agar dapat berfungsi secara baik dan benar. Struktur-struktur politik yang umumnya dimiliki oleh sistem politik adalah partai politik dan kelompok kepentingan, badan legislatif, eksekutif, birokrasi dan badan peradilan (Almond, 1978).

Reformasi dalam aspek kultur politik adalah mereformasi budaya politik dari budaya politik yang dikembangkan dan didasarkan kepada nilai-nilai tradisi kekeluargaan yang mengutamakan penggunaan emosi di dalam penentuan sikap dan tingkah laku politik (seperti yang dikenal dengan istilah paternalistik atau pun patron-klien, juga tradisi budaya politik yang tertutup, sentralistik, manipulatif dan sebagainya) menuju budaya politik yang demokratis, mengarah kepada keterbukaan, kejujuran, persamaan dan keadilan. Budaya politik yang demokratis menyangkut suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi (Almond dan Verba, 1990). Selanjutnya budaya politik yang demokratis akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil.

Selanjutnya dalam konteks reformasi proses politik adalah upaya untuk memungkinkan terwujudnya mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan negara. Artinya tidak ada lagi pemusatan kekuasaan oleh eksekutif dalam seluruh pelaksanaan proses politik. Apabila kekuasaan eksekutif terlampau dominan tanpa diimbangi oleh kuatnya fungsi legislatif maka akuntabilitas sebagai hal yang sentral dalam demokrasi tidak berjalan. Di lain pihak, apabila badan yudikatif tidak berfungsi secara benar akibat dominasi eksekutif dan lemahnya legislatif akan berimplikasi pada lemahnya aspek kontrol dan penegakan hukum.

Proses politik yang demikian pada akhirnya akan menghasilkan produk-produk kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Reformasi dalam hal produk politik sangat berkaitan dengan tiga aspek yang telah dibicarakan sebelumnya. Hal ini disebabkan produk politik berupa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan sangat tergantung dari proses politik yang sedang berlangsung. Proses politik ditentukan oleh berjalannya secara baik fungsi-fungsi dari struktur-struktur di dalam sistem politik. Apabila setiap struktur tersebut dapat berfungsi secara benar dan ditunjang oleh kultur politik yang demokratis pada akhirnya akan menghasilkan produk-produk kebijakan yang memenuhi sebanyak mungkin nilai dan kepentingan warga masyarakat.

Pada tataran empiris, sejak berakhirnya tahapan transisi yang ditandai dengan terbentuknya pemerintahan baru yang *legitimate* sampai dengan saat ini ada beberapa indikator yang mengarah pada pembentukan instalasi demokrasi. Indikator itu antara lain dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1. Amandemenisasi terhadap UUD 1945 telah dilakukan sebanyak dua kali.
2. Ditetapkannya serangkaian ketetapan produk lembaga tertinggi negara yang menjadi dasar reformasi politik.
3. Kekuasaan lembaga kepresidenan dapat dikontrol sehingga berimplikasi pada dicabutnya mandat presiden seperti kasus yang terjadi pada Gus Dur.
4. Menguatnya peran lembaga legislatif.
5. Dibangunnya nuansa kehidupan kepartaian yang sehat.
6. Terciptanya iklim yang kondusif bagi penguatan masyarakat sipil.
7. Dibangunnya jajaran birokrasi yang bersifat netral dan profesional.
8. Dibangunnya pola rekrutmen politik yang terbuka serta mengarah pada profesionalisasi.
9. Dilakukannya berbagai upaya pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat mau pun daerah.
10. Diberikannya otonomi yang seluas-luasnya pada daerah.
11. Diberikannya ruang gerak yang cukup untuk melakukan partisipasi politik otonom.
12. Dibangunnya suasana penghormatan terhadap HAM.
13. Telah dilakukannya berbagai upaya manajemen konflik seperti di Aceh dan Maluku.
14. Dikurangnya peran militer dalam politik.

Singkatnya, instalasi demokrasi yang dibangun sejak masa Gus Dur dan dilanjutkan pada masa Megawati saat ini terus berlangsung sehingga nantinya diharapkan akan tercipta demokrasi yang terkonsolidasi. Sehubungan dengan hal ini Mackie mengatakan sebuah rezim pasca transisi di Indonesia haruslah memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) tidak membangun kekuasaan pribadi yang luar biasa melalui pemusatan berlebihan atas sumber-sumber keuangan untuk mengambil keputusan

akhir di satu tangan ; (2) tidak lagi melaksanakan upaya-upaya yang mengekang kegiatan masyarakat dalam politik ; (3) dapat menciptakan nuansa kehidupan politik dan partisipasi politik yang lebih demokratis ; (4) meninggalkan ciri-ciri sistem pemerintahan yang terpusat dan bersifat patrimonialistik ; (5) dapat menciptakan hubungan yang baik dan terorganisir antara pemerintah dengan berbagai kelompok dalam masyarakat khususnya kelompok Islam ; dan (6) perimbangan kekuatan antara negara dengan masyarakat (Forrester dan R.J. May (eds.), 1998).

Dari enam persyaratan di atas, nyatalah bahwa proses demokratisasi itu adalah suatu proses yang sulit, yang memerlukan berbagai upaya dan dalam jangka waktu yang panjang. Semoga saja proses demokratisasi di Indonesia tidak berbalik arah pada terkonsolidasinya kembali rezim otoritarian.

V. PENUTUP

Jalan menuju demokrasi di setiap negara tidaklah selalu mulus. Pemerintahan baru di mana pun berada dan tengah memasuki masa transisi menuju demokrasi umumnya menghadapi sejumlah masalah yang serius. Masalah yang cukup pelik diatasi dalam tahap instalasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah masalah disintegrasi, perpecahan di tubuh elit, *euphoria* massa, “kebisingan” dalam gedung parlemen, kehidupan kepartaian yang gontok-gontokan dan bila diurut lagi akan menghasilkan daftar yang panjang. Untuk itu proses demokratisasi khususnya tahap instalasi dan konsolidasi ini merupakan titik-titik rawan yang menjadi penentu demokratis atau tidaknya wajah Indonesia masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict dan Audrey Kahin (eds.). (1982). *Interpreting Indonesian Politics : Thirteen Contributions to Debate*. Ithaca : Cornell University.
- Almond, Gabriel A. “Studi Perbandingan Sistem Politik” dalam Mohtar Mas’oed dan Collin MacAndrews. (1978). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- dan Sidney Verba. (1990). *Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta : Bina Aksara.
- Budiman, Arief. (1991). *Negara dan Pembangunan : Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Jakarta : Yayasan Padi dan Kapas.
- Fatah, Eep Saefulloh. (2000). *Zaman Kesempatan : Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung : Mizan.

- Forrester, Geoff dan R.J. May (eds.). (1998). *The Fall of Soeharto*. London dan Australia : C. Hurts & Co. and Crawford House Publishing.
- Gaffar, Afan. (1991). "Partisipasi Politik di Indonesia" dalam *Prospektif No.1 Volume 3*. Yogyakarta : FISIPOL UGM.
- (1999). *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P. (1995). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Terjemahan Asril Marjohan. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Jackson, Karl D. "Bureaucratic Polity : A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communication in Indonesia" dalam Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye (eds.). (1978). *Political Power and Communications in Indonesia*. Berkeley : University of California Press.
- LIP FISIP-UI. (2000). *Memastikan Arah Baru Demokrasi*. Bandung : Mizan.
- Mas'oed, Mohtar. (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta : LP3ES.
- O'Donnel, Guillermo dan Philippe Schmitter. (1993). *Transisi Menuju Demokrasi ; Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Terjemahan dari *Transitions from Authoritarian Rule : Tentative Conclusions About Uncertain Democracies*. Jakarta : LP3ES.
- Uhlen, Anders. (1995). *Democracy and Diffusion : Transnational Lesson-Drawing Among Indonesian Pro-Democracy Actors*. Malm : Lund Political Studies.
- (1997). *Indonesia and The Third Wave of Democratization*. Richmond Surrey : Curzon Press.